

Abstrak

Terjadinya penyelundupan barang-barang illegal semakin sering terjadi, hal ini sebagai konsekwensi berkembangnya ekonomi, maka, penyidik Dirjen Bea Cukai (DJBC) seharusnya dapat berperan dan memberikan efek jera pada setiap perkara tindak Pidana Kepabeanan, namun dengan berbagai pertimbangan, tindak pidana penyelundupan justru menjadi suatu bagian dari sistem pendapatan negara, adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan adalah untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan dan apa sajakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kuantitatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan perumusan Undang - Undang tentang kepabeanan dalam merumuskan tindak pidana penyelundupan yang pernah ada yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku. Data yang di dapat di analisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menyeleksi data yang terkumpul kemudian di analisis dengan peraturan maupun pendapat para ahli.

Peranan DJBC untuk melakukan penegakan hukum, di mulai dari tahap memeriksa sarana pengangkut khususnya darat, serta melakukan koordinasi dengan instansi intelejen, Polisi Badan Narkotika Nasional, Dirjen Perhubungan dan TNI. lebih khusus DJBC wajib berkoordinasi dengan Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber lainnya. Hambatan Penyidik DJBC adalah lemahnya koordinasi dan kerja sama dengan instansi Jasa Pengiriman Paket khususnya jasa pengiriman paket dengan stempel *forwarder*, dan Jasa antaran pada enduser banyak tidak melengkapi persyaratan point memiliki *scanning*, sehingga perkara distribusi narkoba dari pengangkutan darat sering terjadi, Kendala lainnya adalah regulasi di temukan dalam Pasal 64A Undang - Undang 17 Tahun 2006 perihal mengesampingkan penegakan hukum dan mengutamakan pendapatan negara.

Abstract

The occurrence of smuggling illegal goods are increasingly common, it is as a consequence of the expansion of the economy, then, Director General of Customs investigators (DJBC) should be able to play a role and provide a deterrent effect on any Customs criminal act matters but with a range of considerations, the crime penyelundupan thus became a part of the revenue of the State, as for who becomes the goal in writing is to know the role of Investigator civil servant the Directorate General of customs and Excise in tackling the crime penyeludupan and what are the obstacles Investigators civil servant Office supervision and service of the Directorate General of customs and Excise in tackling the crime of smuggling

This research uses the juridical normative approach with the method qualitative. The specification of this research is a descriptive analysis, that describes the formulation of legislation on customs in formulating criminal acts of smuggling that has never been associated and analyzed with the theory-theory of law. Data that can be in the qualitative analysis with the method of analysis, that is, it selects data collected later in the analysis with the regulations as well as the opinions of the experts.

DJBC's role to do law enforcement, at the start of the stage of checking means of transport in particular land, and make coordination with intelligence agencies, Police Director General, National Narcotics Agency of transportation and TNI. more specifically the mandatory DJBC coordinate with a post office, a service company of deposit, Angkasa Pura and other sources. The obstacles Investigators DJBC is weak coordination and cooperation with agencies especially Package delivery service delivery service package with stamp forwarder, and service deliveries on enduser much does not complement the requirements of point has a scanning, so the matter of drug distribution of transportation by land other Barriers often happens, is regulation found in section 64A legislation 17 years 2006 subject Dubstep set aside the rule of law and State revenue. suggestions for DJBC is adding roles with the authorities tapping (wiretapping), and to tighten oversight, improving the examination of custosm registration documents in accordance with the provisions of the Customs and Excise Administration consistently.